

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, M. N., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. *Jurnal USM Law Review*, 4(2).
- Ahdiat, A. (2024). Sejak Ada Dana Desa, Tren Korupsi di Desa Meningkat. Diakses pada 8 Juli 2024, dari databoks.katadata.co.id website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/03/sejak-ada-dana-desa-tren-korupsi-di-desa-meningkat>
- Alexsander, P. (2021). *Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Dana Desa dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Medan*. Universitas Medan Area.
- Alfarezi, A. (2022). *Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undanh Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Universitas Jambi.
- Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Proceeding 6th University Research Colloquium 2017: Seri Humaniora, Sosial, Dan Agama*.
- Asmorojati, A. W. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRI*. UAD Press.
- Asmorojati, A. W., Suyadi, Suyitno, Aji, E. P., & Amanta, D. R. F. (2022). Pelatihan Integritas Perangkat Desa Banguncipto di Masa Pandemi Covid-19. *Borobudur Journal on Legal Services*, 3(1).
- Aurindah, R. D., & Arham, A. Z. (2024). Check and Balance Pengelolaan

Keuangan Desa Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Diakses pada 16 September 2024, dari djp.kemenkeu.go.id website: <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4308-check-and-balance-pengelolaan-keunagan-des-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat.html#:~:text=Kompetensi yang kurang dari perangkat desa dapat,transparansi%2C dan keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal.>

Bahri, S., Muhibbin, M., & Suratman, S. (2024). Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan. *Jurnal USM Law Review*, 7(1).

Bahtiar, R. A. (2023). Upaya penguatan pengelolaan dana desa. *Artikel Info Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan*, XV(14), 3.

Fadilah, F. I., Brata, Y. R., & Katimin, H. (2023). Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Retribusi Dihubungkan dengan Tindak Pidana Korupsi. *Case Law-Journal of Law*, 4(2).

Fitriyanti, A., Indriani, E., & Suryantara, A. B. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Wisata di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Risma*, 2(1).

Fuadi, A. B. (2020). Pertanggung Jawaban Pribadi dan Jabatan dalam Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Supremasi Hukum*, 9(2).

Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Jurnal Khazanah Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3>.

Gustiansyah, M. R. (2023). Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa di

- Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3).
- Handayani, L. T. (2022). *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)*. DKI Jakarta: PT. Scinfintech Andrew Wijaya.
- Hatimatunnisani, H., Nurfadillah, H., Wasti, M., Rika, P., & Maharani, R. (2023). Maraknya Judi Online dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Keuangan di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1).
- Huda, N. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah* (Cet IV). Bandung: Nusa Media.
- Huda, N. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah* (Cet. II). Bandung: CV. Hikam Media Utama.
- Ihsanudin, R., Dewi, D. A., & Ardiansyah, M. I. (2023). Maraknya Judi Online di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung. *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(1), 73–87. <https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.2023.003.01.08>
- Illahi, B. K., Ardilafiza, & Salsabila, A. (2023). Materi Muatan Peraturan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Menurut Sistem Pemerintahan Desa. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1).
- Indonesian Corruption Watch. (n.d.). ICW Adalah. Diakses pada 10 Agustus 2024, dari antikorupsi.org website: <https://antikorupsi.org/id/siapa-icw#:~:text=Dalam menjalankan misi tersebut%2C ICW,pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.>
- Indonesian Corruption Watch. (2022). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*. Indonesia Corruption Watch.
- Isgiyata, J., Indayani, & Budiyni, E. (2018). Studi Tentang Teori Gone dan

Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi : Studi Pada Pengadaan Barang / Jasa di Pemerintahan. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1).

Iswanto, A. (2023). Artikel - Korupsi Desa dan Strategi Pencegahannya. Diakses pada 15 September 2024, dari py-palangkaraya.go.id website: <https://pt-palangkaraya.go.id/berita/artikel/773-korupsi-desa-dan-strategi-pencegahannya>

Juhaeni, J. (2021). Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Konstituen*, 3(1).

Kaunang, H. A. M. (2019). Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Lex Et Societatis*, VII(11).

Lewokeda, K. M. D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Jurnal Mimbar Keadilan*, 14(28), 183–196.

Luthan, S. (2007). Hubungan Hukum Dan Kekuasaan. *Jurnal Hukum*, 14(2), 166–184.

Mahriadi, N., Agustang, A., & Idhan, A. M. (2021). Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo*, VIII(2).

Mokosuli, S. V., Kaawoan, J. E., & Waworundeng, W. (2022). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Lobu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa

- Tenggara. *Jurnal Eksekutif Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 2(2).
- Mudian, S. S. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus putusan Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks)*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mustamu, J. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi). *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, 20(2).
- Muzakir, A. K. (2019). *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan* (Edisi Revi). Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Ollong, E., Latuconsina, R., Wasolo, A. T., & Vudyanto. (2021). Faktor Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Maluku. *Jurnal Aneka Ilmu Hukum*, 1(1).
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>
- Pangaribuan, R. R. F., Palilingan, T. N., & Wewengkang, F. S. (2023). Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Lex Administra*, 18(5).
- Parianti, N. P. I., Suartana, I. W., & Badera, I. D. N. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Niat dan Perilaku Whistleblowing Mahasiswa Akuntansi. *E-Journal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(5).
- Rudy. (2022). *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa* (Cet. 1). Bandar Lampung:

CV. Anugrah Utama Raharja.

Ryanti, S. (2022). Penyelewengan Dana Desa Untuk Gali Lobang Tutup Lobang, Pembangunan Jadi Terbengkalai. Diakses pada 21 September 2024, dari portalbandungtimur website: <https://portalbandungtimur.pikiran-rakyat.com/regional/pr-945783843/penyelewengan-dana-desa-untuk-gali-lobang-tutup-lobang-pembangunan-jadi-terbengkalai?page=all>

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Peraturan Bupati Klaten Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Desa Tegalyoso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalyoso Tahun 2018.

Peraturan Desa Tegalyoso Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalyoso Tahun 2019.

Salim, & Erlies. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Cet-1). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Silahuudin, M. (2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- Sufriadi. (2014). Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(1).
- Sumaryati, Suyadi, Nuryana, Z., & Asmorojati, A. W. (2022). Anti-corruption Action : A Education Model During COVID-19. *Frontiers in Education*, 7. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.907725>
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (cetakan ke; Irfan Marhani, Ed.). Riau: DOTPLUS Publisher.
- Tumengkol, A. R. (2015). Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance. *Jurnal Lex Administratum*, III(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wahyuningsih, I. (2020). Analisis Pengaruh Gone Theory, Integritas, dan Religiusitas Terhadap Academic Fraud. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Walean, T., Mantri, M. S., & Pati, A. B. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal*

Governance, 1(2).

Witasari, A. (2016). Perspektif Teori Kewenangan Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, III(1), 12–20.

Yunus, R. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2).